



Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Retribusi Geledah Kantor Dishub, Kejari Sita Enam Karung Berkas

Negara (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Selasa (20/6) pagi melakukan penggeledahan serta penyitaan berkas di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Kelautan dan Perikanan Jembrana. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan retribusi terminal manuver Gilimanuk tahun 2016.

Kasus yang diindikasikan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah ini sudah masuk tahap penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana. Selain di Kantor Dishub, penggeledahan juga dilakukan di kantor terminal manuver Gilimanuk dalam waktu bersamaan.

Dari pantauan kemarin, Tim Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Jembrana datang sekitar pukul 10.00 Wita. Tim yang dipimpin Kasi Pidsus Made Pasek Budiawan dan Kasi Pidum Putu Eka Sabana Putra menemui Kepala Dishub dengan membawa surat

perintah penggeledahan. Di kantor Bagian Perhubungan, tim menggeledah dan menyita sejumlah berkas yang diperlukan.

Selama tiga jam penggeledahan, tim mengumpulkan 28 berkas. Sementara itu, penggeledahan di kantor parkir manuver Gilimanuk, tim yang dipimpin Kasi Intel Kejari Jembrana Ariyo Dewanto ini mengamankan sejumlah berkas di kantor tersebut. Tumpukan kardus yang berada di sudut kantor dan di dalam lemari juga diperiksa petugas.

Mereka mengamankan sejumlah berkas yang diper-

lukan dan dicari untuk memperkuat bukti. Di sini petugas mengamankan sekitar enam karung bekas yang sebagian besar merupakan karcis-karcis untuk retribusi masuk terminal manuver.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Made Pasek Budiawan mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi terminal manuver Gilimanuk. Kasus ini masuk tahap penyidikan dan saat ini tim mengumpulkan sejumlah alat bukti.

"Belum ada tersangka. Kami masih mengumpulkan

alat bukti termasuk sekarang ini (penggeledahan-red) yang dilakukan. Saksi-saksi juga sudah kita mintai keterangan," terang mantan Kasi Pidsus Kejari Klungkung ini. Selain di Kantor Dinas, menurutnya, juga ada tim lain ke terminal manuver Gilimanuk.

Sementara itu, Kepala Dishub, Kelautan dan Perikanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya penggeledahan dan penyitaan berkas tersebut. Kasus ini muncul setelah munculnya selisih laporan antara pendapatan yang masuk ke kas daerah dan jumlah data kendaraan keluar Bali.

Selama setahun yakni 2015-2016, pengelolaan retribusi parkir manuver Gili-

manuk dilimpahkan ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Jembrana. Sementara tahun 2017, menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perhubungan bergabung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya selama beberapa tahun, pengelolaan retribusi pendapatan daerah ini dilakukan Perusa Jembrana. Sekadar diketahui retribusi terminal manuver berlokasi sebelum pintu loket masuk Pelabuhan Gilimanuk dipungut bagi kendaraan yang hendak keluar Bali. Retribusi ini diberlakukan bagi semua kendaraan yang keluar Bali melintasi terminal manuver Gilimanuk. Nilai karcis berdasarkan jenis kendaraan, seperti roda, dua roda empat, truk dan bus. (kmb26)

Edisi : Minggu, 8 Juni 2017

Hal : 14



Polda Bali OTT di Dinas Perizinan Gianyar

Kabid B Diamankan, BB Rp 15 Juta

Gianyar (Bali Post) -

Polda Bali kembali turun di Kabupaten Gianyar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Mereka menasar Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar, Jumat (16/6) kemarin. Dari operasi itu polisi mengamankan Kabid B Dinas PMPPTSP Nyoman Sukarja. Pejabat berkumis ini langsung digiring ke Polres dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp 15 juta.

Kedatangan petugas dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali langsung mengarah ke Kantor Dinas PMPPTSP pada Jumat siang pukul 10.00 Wita. Kedatangan petugas, membuat panik seluruh staf di kantor perizinan itu. Beberapa menit melakukan pemeriksaan, polisi lantas menggiring Kabid B Dinas PMPPTSP Nyoman Sukarja ke Mapolres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan sementara.

Pantauan *Bali Post*, polisi yang dikomando Wadirkrimsus Polda Bali AKBP Ruddi Setiawan, tidak hanya mengobok ruang Kabid B Dinas PMPPTSP, juga ruang kerja

lain termasuk ruang Kepala Dinas PMPPTSP Ketut Mudana. Proses pemeriksaan sejumlah berkas ini pun berlangsung cukup lama hingga pukul 13.22 Wita.

Usai pemeriksaan, polisi membawa sejumlah berkas. Selanjutnya mengarah ke Mapolres Gianyar untuk menjemput Nyoman Sukarja, yang kemudian digiring ke Mapolda Bali.

AKBP Ruddi Setiawan menyatakan operasi yang dilakukan di Kantor Dinas PMPPTSP merupakan OTT, dengan menangkap Kabid B Dinas PMPPTSP Nyoman Sukarja. "Kami dari Subdit Tipikor Polda Bali melaku-

kan kegiatan operasi tangkap tangan, yang ditangkap salah satu kabid perizinan bernama Nyoman S, kita juga bawa beberapa rekannya, untuk diambil keterangan di Polda Bali," katanya.

Pada OTT kemarin, AKBP Ruddi Setiawan mengaku mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti laptop, termasuk juga uang tunai sekitar Rp 15 juta. "Dugaannya apa, tunggu hasil pemeriksaan, yang pasti ini pungli dan ada uang yang kita temukan sekitar Rp 15 juta," ungkapnya.

Hal. 19
Beberapa Saksi

Edisi : Minggu, 18 Juni 2017

Hal : 1 dan 19



Beberapa Saksi

Dari Hal. 1

Sementara itu, Kepala Dinas PMPPTSP Ketut Mudana mengaku saat OTT berlangsung dirinya sedang berada di Klungkung menghadiri upacara adat. Setelah menerima telepon bahwa terjadi OTT, ia langsung meluncur ke Kantor Bupati Gianyar. "Sekitar pukul 10.30 Wita, saya dihubungi seorang polisi. Katanya ada kabit saya menerima uang dari yang mengurus izin sebesar Rp 15 juta, dan sekarang (kemarin - red) kabit saya ini sedang diperiksa," ucapnya.

Setiba di kantor Dinas PMPPTSP, Ketut Mudana langsung disambut petugas. Di dalam ruang kerjanya, Mudana pun mengaku dicerca sejumlah pertanyaan oleh petugas terkait permohonan izin, dari pengajuan sampai diterbitkan. "Dari pertanyaan itu saya berikan brosur, SOP, hingga perda tentang retribusi perizinan. Polisi juga meminta besaran retribusi, sampai realisasi penerimaan retribusi yang ada diperizinan," katanya.

Usai pemeriksaan itu, Mudana diminta untuk mengikuti pemeriksaan lebih lanjut di Polda Bali. Selain Kadis PMPPTSP, polisi juga menggiring sejumlah staf seperti bagian teknis, kasir dan *front office*. "Saya katakan siap diperiksa termasuk staf saya, tetapi sebelumnya saya minta izin dulu kepada Bapak Bupati dan Wakil," ujarnya.

Terkait uang Rp 15 juta yang diamankan polisi, Mudana sontak mengaku tidak tahu-menahu terkait uang yang diamankan dari Kabit B PMPPTSP asal Pejeng, Tamapaksiring itu. "Saya belum tahu, uang itu untuk apa. Digunakan untuk urus izin apa," katanya.

Dia menduga uang Rp 15 juta itu untuk mengurus IMB. Dikatakan, biaya pengurusan IMB memang cukup tinggi yakni dari Rp 2 juta hingga ratusan juta rupiah. Disinggung terkait tupoksi tugas Nyoman Sukarja sebagai Kabit B PMPPTSP, dikatakan, izin bidang B meliputi izin tanda daftar perusahaan, SIUP-MB hingga izin toko modern. "Permohonan ijin itu (IMB - red) memang bisa saja, karena nilainya memang bervariasi, ada yang ratusan juta seperti permohonan izin rumah sakit di Mas Ubud itu," katanya.

Untuk memastikan tidak terjadinya gangguan pelayanan kepada masyarakat pasca-OTT ini, Mudana kini mengarahkan salah satu kasi untuk memegang komando Bidang B. Selain itu, ia juga sedang berupaya menenangkan staf lainnya yang panik setelah OTT tersebut. "Saya tahu ini sangat berpengaruh pada staf dan tadi semua staf saya ketakutan dari sini sampai staf di atas dicek. Senin saya kumpulkan agar tidak takut, karena pasti polisi bekerja profesional," tandasnya. (kmb35)

Edisi : Minggu, 18 Juni 2017

Hal : 19